



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat Ke- | : 15 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Senin, 21 September 2020 |
| Waktu | : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : 1. Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar; dan 2. Pengambilan Keputusan. |
| Ketua Rapat | : H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP C. Ketua DKPP |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar dan pengambilan keputusan, hari Senin, 21 September 2020, dibuka pukul 11.45 WIB dan dilanjutkan kembali pukul 13.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua DKPP membahas terkait membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar dan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Menteri Dalam Negeri menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar **Rp3.204.700.438.000,- (tiga triliun dua ratus empat milyar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp17.303.307.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum : Rp153.137.009.000,-
 - b. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa : Rp524.306.353.000,-
 - c. Program Tata Kelola Kependudukan : Rp681.650.683.000,-
 - d. Program Dukungan Manajemen : Rp1.845.606.393.000,-
2. Menteri Dalam Negeri menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp.1.275.386.488.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp91.949.051.000,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah)**.
3. Kepala BNPP menyampaikan Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp227.704.562.000,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen : Rp170.750.473.000,-
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan : Rp56.954.089.000,-

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua DKPP membahas terkait membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar dan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar **Rp3.204.700.438.000,- (tiga triliun dua ratus empat milyar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp17.303.307.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum : Rp153.137.009.000,-
 - b. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa : Rp524.306.353.000,-
 - c. Program Tata Kelola Kependudukan : Rp681.650.683.000,-
 - d. Program Dukungan Manajemen : Rp1.845.606.393.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp.1.275.386.488.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp91.949.051.000,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp227.704.562.000,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
- c. Program Dukungan Manajemen : Rp170.750.473.000,-
 - d. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan : Rp56.954.089.000,-

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 21 September 2020
KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270